KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 DAN DETERMINANNYA

(Inequality of Education in Sulawesi Tenggara 2019 and Its Determinants)

Dewi Cahaya Fitri¹, Yaya Setiadi²

Politeknik Statistika STIS¹

Politeknik Statistika STIS²

Jalan Antang Kalang V no. 7, Palangkaraya 13330

E-mail: 111709620@stis.ac.id

ABSTRAK

Kemerataan pendidikan adalah salah satu permasalahan yang perlu ditanggapi dengan serius. Hal ini bersesuaian dengan tujuan keempat dari SDGs (Sustainable Development Goals) yang mengemukakan tentang pendidikan, yaitu pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan ketimpangan pendidikan di suatu daerah. Ketimpangan pendidikan adalah salah satu permasalahan yang harus diselesaikan karena, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sayangnya, pemenuhan pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Kendari yang melampaui tingginya kabupaten/kota di DKI Jakarta yang tidak diikuti oleh kabupaten/kota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketimpangan pendidikan di Sulawesi Tenggara yang diukur dengan Koefisien Gini Pendidikan (KGP) tahun 2019 dan determinannya dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) signifikan memengaruhi KGP sedangkan persentase penduduk miskin dan persentase anggaran pendidikan tidak signifikan memengaruhi KGP di Sulawesi Tenggara 2019.

Kata kunci: KGP, RLS, AMH, Penduduk Miskin, Anggaran Pendidikan

ABSTRACT

The issue of equitable education is one of the issues that needs to be taken seriously. This is in line with the fourth objective of the SDGs (Sustainable Development Goals) which proposes education in 2030, ensuring that all females and males complete free, equal and quality primary and secondary education, which leads to relevant learning outcomes and effective. Equitable education is related to educational inequality in an area. Inequality in education is one of the problems that must be resolved because, as stated in the UUD 1945 Pasal 31 that every citizen has the right to education. Unfortunately, the fulfillment of educational equality has still not been fully realised. This is shown by the high of Mean Years of Schooling (MYS) in Kendari which exceeds all MYS in districts/cities of DKI Jakarta which are not followed by other districts in Sulawesi Tenggara. This study aims to determine the description of educational inequality in Sulawesi Tenggara as measured by the 2019 Gini Coefficient of Education and its determinants with multiple linear regression methods. The results showed that the Literacy Rate significantly influenced Gini Coefficient of Education while the percentage of poor population and the percentage of the education budget did not significantly influence Gini Coefficient of Education in Sulawesi Tenggara 2019.

Keywords: Gini Coefficient of Education, MYS, Literacy Rate, Education Budget

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia suatu negara dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2011). Sumber daya manusia bukanlah hanya sebuah modal fisik yang bersifat pasif seperti sumber daya alam namun sumber daya manusia merupakan sumber daya yang bersifat aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, suatu negara perlu mengembangkan keahlian serta pengetahuan sumber daya manusianya untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Masalah pemerataan pendidikan adalah salah satu hal yang perlu ditanggapi dengan serius. Hal ini bersesuaian dengan tujuan keempat dari SDGs (Sustainable Development Goals) yang

mengemukakan tentang pendidikan yaitu pada tahun 2030, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan ketimpangan pendidikan di suatu daerah. Ketimpangan pendidikan adalah salah satu permasalahan yang harus diselesaikan karena, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan rakyat Indonesia adalah dengan program wajib belajar dua belas tahun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pasal 2 huruf a.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendidikan adalah gini rasio pendidikan yang mengukur rasio rata-rata capaian tahun sekolah dari semua penduduk (Thomas et al., 2001). Gini rasio pendidikan memiliki indeks dari angka 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), semakin mendekati nol angka gini rasio pendidikan, maka semakin baik tingkat pemerataan capaian pendidikan. Sebaliknya, semakin mendekati satu maka menunjukkan terjadinya ketidakmerataan capaian pendidikan atau disebut juga ketimpangan pendidikan di wilayah tersebut.

Gambar 51. Rata-rata Lama Sekolah menurut Provinsi tahun 2019.

Provinsi Sulawesi Tenggara berada di posisi ketiga belas tertinggi dengan Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,91 tahun (Gambar 1). Terdapat selisih sebesar 2,15 tahun antara RLS DKI Jakarta dan RLS Sulawesi Tenggara. RLS Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dikatakan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, namun program wajib belajar dua belas tahun masih belum tercapai.

Gambar 52. Perbandingan RLS Sulawesi Tenggara dan DKI Jakarta 2019.

Berdasarkan Gambar 2 dapat terlihat bahwa RLS tertinggi Sulawesi Tenggara masih berada di wilayah perkotaan. Posisi tiga RLS tertinggi diduduki oleh Kota Kendari sebesar 11,94 tahun, Kota Baubau sebesar 10,37 tahun dan Konawe Kepulauan sebesar 9,18 tahun. Kota Kendari memiliki RLS yang tinggi, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan semua RLS Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta (Gambar 2). Namun, RLS Kota Kendari yang sudah mendekati angka dua belas ini tidak diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain. Di Kabupaten Muna Barat, RLS hanya

mencapai angka 6,77 tahun atau hanya 0,57 kali RLS Kota Kendari. Selisih sebesar 5,17 tahun antara wilayah dengan RLS tertinggi dan RLS terendah ini menjadi indikasi bahwa terjadi ketimpangan pendidikan di wilayah Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, semua kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah memiliki Rata-rata Lama Sekolah yang dapat dikatakan tinggi dengan RLS tertinggi sebesar 11,65 tahun di Kota Jakarta Timur dan RLS terendah sebesar 8,47 tahun di Kabupaten Kepulauan Seribu (Gambar 2). Selisih antara RLS tertinggi dan RLS terendah di Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 3,18 tahun. Selisih antara RLS tertinggi dan RLS terendah di Provinsi DKI Jakarta lebih kecil dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara. Angka selisih ini memperkuat indikasi adanya ketimpangan pendidikan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rahayu (2005) menemukan RLS berpengaruh negatif terhadap indeks gini pendidikan. Semakin tinggi RLS, maka semakin rendah indeks gini pendidikannya. Semakin rendah indeks gini pendidikannya berarti semakin kecil pula ketimpangan pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut.

Todaro dan Smith (2011) menyatakan para pelajar yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi sedangkan anak-anak dari keluarga yang tergolong miskin akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jika persentase penduduk miskin di suatu daerah rendah, maka diharapkan akan berpengaruh ke rata-rata lama sekolah di daerah tersebut. Menurut Saputra, *et al.* (2015), tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendidikan. Berarti semakin tinggi tingkat kemiskinan maka akan semakin tinggi juga ketimpangan pendidikan di suatu wilayah. Todaro dan Smith (2011) menyatakan penduduk dengan pendapatan menengah kebawah cenderung sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan oleh kesediaan penduduk berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengeluarkan biaya untuk pendidikan lebih rendah dibandingkan penduduk dengan penghasilan menengah ke atas.

Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan di suatu daerah ditetapkan oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Dengan tingginya persentase alokasi anggaran daerah untuk pendidikan, diharapkan adanya pembangunan sekolah-sekolah baru, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan perbaikan sekolah-sekolah akan mengurangi ketimpangan pendidikan. Bustomi (2012) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Berarti semakin tinggi anggaran di bidang pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah di suatu wilayah maka semakin rendah ketimpangan pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi pendidikan secara signifikan.

Rondong (2009) menemukan tingkat partisipasi sekolah salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan orang dewasa yang diukur dengan AMH. Semakin tinggi tingkat melek aksara maka akan meningkatkan kesadaran penduduknya mengenai pentingnya pendidikan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar ketimpangan pendidikan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menganalisis pengaruh AMH, persentase penduduk miskin, dan persentase APBD murni untuk pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan di Sulawesi Tenggara tahun 2019.

METODE

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata lama sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di suatu wilayah dalam satuan tahun (BPS, 2014).

Ketimpangan Pendidikan merupakan keadaan ketika terdapat ketidaksetaraan pencapaian atau hasil yang dicapai oleh suatu individu atau suatu wilayah tertentu dengan individu atau

wilayah lainnya. Menurut Thomas et al. (2001) ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendidikan adalah Koefisien Gini Pendidikan (KGP).

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya (BPS, 2018). Yuliana (2009) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam bidang pendidikan dapat terlihat dari tingkat melek huruf. Menurut penelitian Rondong (2009), faktor yang dapat memengaruhi partisipasi sekolah salah satunya adalah faktor pendidikan orang dewasa yang diukur dengan AMH.

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) yang dinyatakan dalam satuan persen (BPS, 2019).

Persentase Anggaran Pendidikan Daerah Murni adalah persentase anggaran pendidikan murni tanpa dana transfer daerah bidang pendidikan yang dinyatakan dalam satuan persentase (Kemendikbud, 2018).

Regresi Linear Berganda (RLB) merupakan metode statistik yang digunakan untuk melakukan analisis hubungan antara suatu variabel dependen atau biasa disebut sebagai variabel Y dengan beberapa variabel independen atau biasa disebut variabel X. Metode ini menghasilkan sebuah model yang menggunakan fungsi linear dengan parameter diprediksi dari data yang tersedia. Dalam analisis regresi diperlukan suatu metode untuk menduga parameter agar taksirannya bersifat Best Linear Unbiased Estimation (BLUE), salah satunya dengan metode Ordinary Least Square (OLS) atau Metode Kuadrat Terkecil (Setyaningsih, 2017). Metode ini akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat BLUE jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi (Pangestika, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KGP dibentuk oleh dua komponen yaitu RLS dan proporsi penduduk menurut pendidikan terakhir. Gambar 3 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 RLS Sulawesi Tenggara selalu mengalami peningkatan. RLS terendah Sulawesi Tenggara tercatat pada tahun 2010 sebesar 7,57 tahun dan RLS tertinggi pada tahun 2019 sebesar 8,91 tahun.

Gambar 53. RLS Sulawesi Tenggara 2010-2019.

Capaian RLS di Sulawesi Tenggara selalu menunjukkan kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata kenaikan RLS sebesar 0,15 tahun setiap tahunnya.

Gambar 54. Proporsi Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Terakhir (kiri) dan RLS Sulawesi Tenggara (kanan) tahun 2019.

Pada Gambar 4 terlihat kabupaten yang memiliki RLS di bawah RLS provinsi contohnya Muna Barat dan Buton Tengah memiliki persentase penduduk usia 25 tahun yang tidak tamat SD/ sederajat yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang memiliki RLS di atas RLS provinsi. Kota Kendari dan Kota Baubau juga memiliki persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas lulusan universitas tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Terlihat pada Gambar 5 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara memiliki KGP yang lebih tinggi dibandingkan dengan KGP Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa Kabupaten dan Kota yang secara visual terlihat jelas berada di bawah KGP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 adalah Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Kota Baubau. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tersebut memiliki kondisi pemerataan pendidikan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pemerataan pendidikan di kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan.

Gambar 55. Koefisien Gini Pendidikan Sulawesi Tenggara 2019.

KGP pada Gambar 5 dicocokkan kembali dengan proporsi penduduk berusia 25 tahun ke atas menurut pendidikan terakhir pada gambar 9 dan rata-rata lama sekolah pada Gambar 8, dapat terlihat jika rendahnya KGP di Kota Kendari dan Kota Baubau bersesuaian dengan rata-rata lama sekolahnya yang tinggi serta berbanding lurus pula dengan keadaan kota tersebut yang memiliki persentase penduduk yang berpendidikan terakhir SMA sederajat yang tinggi dan persentase penduduk yang berpendidikan terakhir universitas yang tinggi juga. Kondisi pemerataan pendidikan di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan Barat, Kota Kendari dan Kota Baubau tahun 2019 berbanding lurus dengan kondisi RLSnya masing-masing pada tahun 2019. Kabupaten/Kota yang memiliki KGP di bawah KGP Provinsi cenderung memiliki RLS yang tinggi. Contohnya seperti Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Konawe Utara. Ketiga Kabupaten ini memiliki nilai KGP yang berada di bawah rata-rata KGP

Provinsi. Ketika dicocokkan dengan RLSnya, ketiga kabupaten ini juga memiliki RLS di atas RLS Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, Muna Barat yang memiliki RLS terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 memiliki KGP kedua tertinggi setelah Buton Tengah. Berikut disajikan tabel pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan KGP provinsi.

Tabel 1. Kabupaten/Kota berdasarkan KGP

Tahun	Kategori KGP	Kabupaten/Kota
2018	KGP < KGP Provinsi	Kolaka, Buton Utara, Konawe, Konawe, Kepulauan, Konawe Utara, Kota Baubau, Kota Kendari
	KGP ≥ KGP Provinsi	Buton Tengah, Muna Barat, Wakatobi, Buton, Kolaka Timur, Buton Selatan, Muna, Kolaka Utara, Bombana, Konawe Selatan.
2019	KGP < KGP Provinsi	Buton Utara, Kolaka, Konawe Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Kota Baubau, Kota Kendari.
	KGP ≥ KGP Provinsi	Buton Tengah, Muna Barat, Kolaka Timur, Buton, Bombana, Muna, Wakatobi, Buton Selatan, Konawe Selatan, Kolaka Utara.

Tabel 1 menyajikan pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan KGP Provinsi pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pengelompokan pertama menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki KGP lebih rendah daripada KGP provinsi, sedangkan kelompok kedua merupakan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki KGP lebih tinggi dibandingkan KGP provinsi. Terlihat dari tabel 1, tidak ada perubahan posisi kabupaten/kota yang berada di atas KGP provinsi atau posisi kabupaten/kota yang berada di bawah KGP provinsi pada periode 2018 sampai dengan 2019.

Gambar 6. Plot KGP dan Persentase Anggaran Pendidikan Sulawesi Tenggara 2019

Gambar 6 merupakan plot antara KGP dan persentase anggaran pendidikan. Kuadran I menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki KGP dan persentase anggaran pendidikannya di atas rata-rata provinsi. Kuadran II menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki KGP di bawah rata-rata provinsi dan persentase anggaran pendidikan di atas rata-rata provinsi. Kuadran III menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki KGP dan persentase anggaran pendidikannya di bawah rata-rata provinsi. Kuadran IV menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki KGP di atas rata-rata provinsi dan persentase anggaran pendidikan di bawah rata-rata provinsi. Gambar 10 menunjukkan terdapat lima kabupaten yang berada di Kuadran I, kabupaten tersebut adalah Buton, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan Buton Selatan. Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat lima kabupaten yang memiliki KGP tinggi dan persentase anggaran yang rendah. Kabupaten tersebut adalah Muna, Bombana, Wakatobi, Muna Barat, Buton Tengah.

Pengaruh AMH, Persentase Penduduk Miskin, Persentase Anggaran Pendidikan Murni terhadap KGP tahun 2019

Untuk mengetahui pengaruh AMH, persentase penduduk miskin dan persentase anggaran pendidikan murni terhadap KGP di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019, dilakukan estimasi Regresi Linear Berganda tahapan sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Pembentukan Model Regresi

		t-hitung	p-value
Konstanta	1,453	6,248	0,000
AMH	-0,013	-5,713	0,000
Persentase Anggaran Pendidikan Murni	0,003	1,202	0,251
Persentase Penduduk Miskin	0,004	1,624	0,128

Persamaan 1 adalah persamaan regresi linear berganda yang terbentuk berdasarkan Tabel 2.
(1)

Keterangan

*) : signifikan dengan α sebesar 5%

AMH : Angka Melek Huruf

PAPM : Persentase Anggaran Pendidikan Murni

PPM : Persentase Penduduk Miskin

Pengujian Keberartian Model

Tabel 3. Hasil Pengujian Simultan dengan Uji-F

	Sum Squares	Derajat Bebas	Mean Square	Nilai F-hitung	p-value
Regresi	0,036	3	0,012	20,721	0,000
Residual	0,008	13	0,001		
Total	0,044	16			

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,000, lebih kecil dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel bebas yang signifikan memengaruhi KGP dengan kata lain, AMH, persentase penduduk miskin, dan persentase anggaran pendidikan murni secara bersama-sama memengaruhi KGP di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial dengan Uji-t

		Nilai t-hitung	p-value
Konstanta	1,453	6,248	0,000
Angka Melek Huruf	-0,013	-5,713	0,000
Persentase Anggaran Pendidikan Murni	0,003	1,201	0,251
Persentase Penduduk Miskin	0,004	1,624	0,128

Terlihat dari tabel 4, didapatkan nilai *p-value* variabel AMH sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05. Dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5 persen terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel bebas AMH secara negatif signifikan memengaruhi KGP di Sulawesi Tenggara tahun 2019. Pada variabel bebas persentase anggaran pendidikan murni, didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,251 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi atau α 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5 persen tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel bebas persentase anggaran pendidikan murni signifikan memengaruhi KGP di Sulawesi Tenggara tahun 2019. Begitu juga dengan variabel bebas persentase penduduk miskin. Pada variabel persentase penduduk miskin didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,128. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel persentase penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan terhadap KGP di Sulawesi Tenggara tahun 2019.

Tabel 5. Hasil Penghitungan Koefisien Determinasi

R	R Square (R^2)	Adjusted R Square (R^2_{adj})
0,909	0,827	0,787

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel bebas AMH, persentase anggaran pendidikan murni, dan persentase penduduk miskin dapat menjelaskan variasi atau keragaman variabel terikat yaitu KGP sebesar 78,7 persen (*Adjusted R²*) dan sisanya yaitu sebesar 21,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Koefisien Gini Pendidikan (KGP)

Berdasarkan model regresi yang didapatkan, AMH berpengaruh signifikan terhadap KGP dengan koefisien regresi -0,013 yang berarti setiap penambahan satu persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf akan menurunkan nilai KGP sebesar 0,013 dengan asumsi persentase anggaran pendidikan daerah murni dan persentase penduduk miskin konstan. Bersesuaian dengan BPS yang menyatakan bahwa AMH dapat memberikan gambaran kemampuan membaca dan menulis masyarakat. Semakin tinggi persentase penduduk yang melek huruf, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk menyerap informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Rondong (2009) yang menemukan bahwa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi sekolah jenjang SD/MI salah satunya adalah faktor pendidikan orang dewasa yang diukur dengan AMH laki-laki dan perempuan, sedangkan pada partisipasi sekolah jenjang SMP/Mts dipengaruhi oleh faktor pendidikan orang dewasa yang diukur dengan AMH laki-laki.

Persentase Anggaran Pendidikan Murni terhadap Koefisien Gini Pendidikan

Dari model yang terbentuk, persentase anggaran pendidikan murni memiliki koefisien regresi sebesar 0,003 yang berarti setiap penambahan satu persen anggaran pendidikan murni akan meningkatkan KGP sebesar 0,003 dengan asumsi variabel AMH dan persentase penduduk miskin konstan. Namun berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel persentase anggaran pendidikan murni tidak signifikan berpengaruh terhadap KGP. Hal ini tidak bersesuaian dengan penelitian Saputra *et al* (2015) dan Bustomi (2012) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendidikan dan penelitian Sholikhah *et al* (2014) yang mendapatkan hubungan positif antara variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan ketimpangan pendidikan. Todaro dan Smith (2011) yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik oleh pemerintah dengan mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih besar dapat menjadi solusi untuk memperkecil ketimpangan pendidikan, namun bisa menjadi faktor melebarnya jurang pemerataan pendidikan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak tepatnya realisasi anggaran pendidikan. Hal ini juga diduga karena pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai seperti untuk sertifikasi guru atau pembangunan gedung sekolah yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap capaian pendidikan. Hal ini juga dapat dikarenakan karena pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan belum secara langsung memberikan hasil yang signifikan, butuh tahapan dan proses serta waktu untuk sampai pada hasil yang baik mengingat Sulawesi Tenggara baru-baru saja meningkatkan persentase anggarannya dari 3,39 persen di tahun 2016 menjadi 13,37 persen pada tahun 2017, lalu mengalami kenaikan lagi di tahun 2018 menjadi 16,55 persen, dan 17,15 di tahun 2019.

Persentase Penduduk Miskin terhadap Koefisien Gini Pendidikan

Berdasarkan model yang terbentuk, persentase penduduk miskin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap KGP. Penemuan ini bertolak belakang dengan penelitian Karini (2018) yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah. Penelitian Ernawati (2013) mendapatkan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat disebabkan oleh budaya penduduk Sulawesi Tenggara yang mengutamakan pentingnya pendidikan. Meskipun berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah, penduduk Sulawesi Tenggara tetap memiliki motivasi yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya.

KESIMPULAN

Kemerataan pendidikan masih terpusat di daerah perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya angka KGP di Kota Kendari dan Kota Baubau, dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019. Dari model yang terbentuk, ketiga variabel mampu menjelaskan variasi KGP di Sulawesi Tenggara sebesar 78,7 persen. AMH berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendidikan di Sulawesi Tenggara tahun 2019. Akan tetapi, variabel persentase penduduk miskin dan variabel persentase anggaran pendidikan murni tidak berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendidikan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2020*. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). *Provinsi Sulawesi tenggara dalam Angka 2020*. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. (2019). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2019*. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bustomi, M. Ja'far. (2012). *Ketimpangan Pendidikan antar Kabupaten/Kota dan Implikasinya di Provinsi Jawa Tengah*. Cited in <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/477>. [8 November 2019]
- Ernawati, T. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat*. Cited in <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/download/126/113>. [26 April 2020]
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Glosarium Pendanaan Pendidikan*. Cited in <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=glosarium>. [10 June 2020]
- Karini, P. (2018). *Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Cited in <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/download/64/65>. [1 December 2019]
- Pangestika, Styfanda. (2015). *Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (Cem), Fixed Effect Model (Fem), dan Random Effect Model (Rem)*. Cited in <https://lib.unnes.ac.id/22312/1/4111411057-s.pdf>. [16 July 2020]
- Setyaningsih, Y.D., Noeryanti. (2017). *Penggunaan Metode Weighted Least Square untuk Mengatasi Masalah Heteroskedastisitas dalam Analisis Regresi (Studi Kasus Pada Data Balita Gizi Buruk Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah)*. Cited in <https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/STATISTIKA/article/view/1099/884>. [16 July 2020]
- Rahayu, Astuti. (2005). *Ketimpangan Pendidikan di Indonesia*. Cited in <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/2147/2074>. [6 November 2019]
- Rondong, F. (2009). *Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar: SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia*. Cited in <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-133149.pdf>. [26 April 2020]
- Saputra, Dedi. dkk. (2015). *Analisis ketimpangan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. Cited in www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/download/4735/4084. [7 November 2019]
- Sholikhah, N. dkk. (2014). *Analisis Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Pendidikan*. Cited in <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/download/4614/1060>. [1 December 2019]
- Thomas, V. dkk (2001). *Measuring Education Inequality: Gini Coefficients of Education*. Cited in <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19738>. [6 November 2019]

- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi kesebelas Jilid 1*. Penerbit Erlangga.
- Yuliana, Chitra Indah. (2009). *Analisis Hubungan antara Indikator Pendidikan dan Kinerja Perekonomian di Indonesia*. Cited in
<http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/download/231/223>. [6 November 2019]